

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kebijakan kelembagaan mukim di Kabupaten Aceh Utara menggunakan Model CIPP (*Context, Input, Process, dan Product*), mengidentifikasi faktor penghambat dan pendukung, serta merumuskan rekomendasi penguatan kelembagaan mukim. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh belum optimalnya fungsi mukim dalam sistem pemerintahan lokal meskipun telah memiliki dasar hukum yang kuat. Dalam praktiknya, mukim masih menghadapi kendala berupa ketidakjelasan posisi kelembagaan, keterbatasan anggaran, rendahnya kapasitas sumber daya manusia, minimnya sarana prasarana, serta lemahnya koordinasi antar lembaga. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan dokumentasi. Informan penelitian terdiri dari unsur DPMG, camat, imum mukim, geuchik, tuha peut, ketua forum mukim, tokoh masyarakat, dan akademisi. Analisis data dilakukan berdasarkan dimensi CIPP. Hasil penelitian menunjukkan bahwa evaluasi kebijakan kelembagaan Mukim di Kabupaten Aceh Utara berdasarkan model CIPP masih memperlihatkan kesenjangan antara desain kebijakan dan implementasi, dengan berbagai keterbatasan pada aspek *input*, *process*, dan *product*, seperti minimnya sumber daya, lemahnya koordinasi, ketidakjelasan kewenangan, serta dampak kebijakan yang masih dominan pada fungsi sosial-adat dan belum optimal dalam pemerintahan dan pembangunan. Faktor penghambat utama berasal dari ketidaksesuaian kebijakan, keterbatasan regulasi dan sumber daya, serta peran Mukim yang cenderung simbolik, sedangkan faktor pendukungnya adalah kuatnya legitimasi sosial-budaya serta komitmen Imum Mukim. Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini merekomendasikan agar pemerintah daerah memperjelas regulasi dan kewenangan mukim, memperkuat dukungan anggaran dan fasilitas, meningkatkan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan berkelanjutan, serta memperkuat mekanisme koordinasi antara mukim, gampong, dan kecamatan. Selain itu, diperlukan integrasi kelembagaan mukim dalam sistem perencanaan pembangunan daerah agar perannya tidak hanya bersifat sosial-adat, tetapi juga strategis dalam tata kelola pemerintahan. Penelitian ini juga menghasilkan novelty berupa Model Evaluasi Kelembagaan Mukim Berbasis Kontekstual-Integratif yang memperluas pendekatan CIPP dengan memasukkan dimensi sosial, budaya, politik, relasi kelembagaan, dan kewenangan untuk memperkuat efektivitas kelembagaan Mukim.

Kata Kunci: Evaluasi Kebijakan, Kelembagaan Mukim, Model CIPP

ABSTRACT

This study aims to evaluate the institutional policies of mukims in North Aceh Regency using the CIPP Model (Context, Input, Process, and Product), identify inhibiting and supporting factors, and formulate recommendations for strengthening mukim institutions. The study was motivated by the fact that mukims have not yet functioned optimally within the local government system, despite having a strong legal foundation. In practice, mukims still face challenges such as unclear institutional positions, budget constraints, low human resource capacity, a lack of infrastructure, and weak coordination among institutions. This study employs a qualitative method with data collection techniques including in-depth interviews, field observations, and documentation. Research informants included representatives from the DPMG, subdistrict heads, imum mukim, geuchik, tuha peut, mukim forum chairs, community leaders, and academics. Data analysis was conducted based on the CIPP framework. The results indicate that the evaluation of the Mukim institutional policy in North Aceh Regency, based on the CIPP model, still reveals a gap between policy design and implementation, with various limitations in the input, process, and product aspects—such as a lack of resources, weak coordination, unclear authority, and policy impacts that remain predominantly focused on social-customary functions rather than being fully optimized for governance and development. The main constraints stem from policy inconsistencies, regulatory and resource limitations, and the largely symbolic role of the Mukim, while the supporting factors include strong sociocultural legitimacy and the commitment of the Imum Mukim. Based on these findings, this study recommends that local governments clarify regulations and the authority of the mukim, strengthen budgetary support and facilities, enhance human resource capacity through ongoing training, and strengthen coordination mechanisms between the mukim, gampong, and kecamatan. Furthermore, the institutional integration of the mukim into the regional development planning system is necessary so that its role is not merely social and customary but also strategic in governance. This study also produced a novel contribution in the form of a Contextual-Integrative Mukim Institutional Evaluation Model, which expands the CIPP approach by incorporating social, cultural, political, institutional relationship, and authority dimensions to strengthen the institutional effectiveness of mukims.

Keywords: Policy Evaluation, Mukim Institutions, CIPP Model